

Rilis Media**Berhadapan dengan Krisis Pangan yang Direncanakan****28 September 2023**

Semboyan *gemah ripah loh jinawi* muncul untuk menggambarkan begitu subur tanah serta makmurnya masyarakat di Indonesia. Namun, penggambaran tersebut makin kabur karena petani yang seharusnya menjadi subjek utama kedaulatan pangan malah terus didorong untuk mengkomodifikasikan hasil lahannya secara besar-besaran. Pemerintah pun seolah mengingkari UUPA 1960 (UU Pokok-pokok Agraria) karena memaksakan pelaksanaan program pangan seperti Food Estate di berbagai wilayah di Indonesia. Ikatan antara masyarakat dengan tanah mereka pun banyak yang akhirnya dipisahkan oleh program yang dinarasikan sebagai solusi krisis pangan ini. Hari Tani Nasional (HTN) yang sejatinya digunakan sebagai momen apresiasi perjuangan golongan petani di Indonesia, akhirnya hanya menjadi seremoni tahunan.

Di saat Pantau Gambut mencatat [kegagalan hasil panen padi Food Estate Kalimantan Tengah](#), data dari Bulog per 22 September 2023 malah menyebutkan realisasi impor beras yang mencapai 1.028.478 ton dari rencana impor 2 juta ton. Juru Kampanye Pantau Gambut, Abil Salsabila pun menanggapi, “Kebijakan pemerintah terkait rencana impor 2 juta ton ini jelas bertolak belakang dengan jaminan kedaulatan pangan oleh negara yang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan program seperti Food Estate ini pada akhirnya tidak tepat.”

Padahal, untuk melaksanakan program ini pemerintah kerap menerabas batasan daya dukung lingkungan. Pantau Gambut mencatat adanya [deforestasi seluas 700 hektare](#) di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pembukaan lahan yang mengatasnamakan solusi krisis pangan ini membuat ekosistem gambut menjadi berisiko semakin terdegradasi. Belum lagi peringatan FAO tentang El Nino yang dikeluarkan Februari 2023 yang memprediksi adanya risiko kegagalan panen. Hal ini merujuk pada pengalaman 2019, dimana penurunan curah hujan berdampak pada hasil panen.

Minimnya pelibatan petani sebagai subjek produsen pangan dan pengabaian ekosistem gambut yang memiliki karakter berbeda dengan tanah mineral, akan berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal. Kajian Pantau Gambut pun menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil panen padi yang ditanam di lahan gambut, dengan padi yang ditanam di lahan mineral.

Tabel 1. Perbandingan hasil produksi padi yang ditanam di lahan gambut dan lahan mineral

| Produktivitas Padi di Lahan Gambut (ton/ha) | | Produktivitas Padi Lahan Mineral (ton/ha) | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Desa Blang Ramee, Aceh Barat | Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi | Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah | Desa Senduro, Lumajang | Kecamatan Banyubiru, Semarang | Kabupaten Badung, Bali |
| 1,5 | 2,9 | 1,9 | 7,2 | 7,3 | 6,2 |

Keterangan: Perbandingan ini hanya mempertimbangkan hasil produksi padi yang ditanam di lahan gambut dan non gambut. Parameter seperti jenis padi, iklim/cuaca, teknik pengelolaan/budidaya, dan perlakuan lainnya terhadap padi tidak masuk dalam pertimbangan. Kajian lengkap Pantau Gambut terkait isu rendahnya produktivitas padi di lahan gambut dapat dibaca dari laporan yang diterbitkan pada Maret 2021.

Penting untuk melakukan evaluasi proyek Food Estate, khususnya pada ekosistem gambut karena dapat mengarah ke kerusakan yang lebih parah. Abil menambahkan, “Pelibatan petani sebagai subjek produsen pangan juga menjadi poin krusial karena pemenuhan pangan tidak bisa bersandar pada mekanisme pasar yang dikendalikan oleh industri pangan monokultur skala besar. Jangan sampai *gemah ripah loh jinawi* berubah menjadi *gemah ripah loh kok gitu*.”

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Abil Salsabila 087770219200 Campaigner Pantau Gambut
Yoga Aprillianno 081390203344 Media Campaigner Pantau Gambut
Email ask@pantaugambut.id
Instagram & Twitter @pantaugambut

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30% karbon dunia. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim. Oleh sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi tentang gambut lainnya, Anda bisa mengakses tautan pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.